

**PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE**

Tita Djuitaningsih

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Kuningan – Jakarta Selatan 12920

Telp.: +62-21-5261448, HP: +68122313515

e-mail: tita@bakrie.ac.id

Wahdatul A Marsyah

Alumni Prodi Akuntansi Universitas Bakrie

PT Benakat Barat Petroleum

Telp.: +62-21-54948812, HP: +685274732050

e-mail: wahda.marsyah@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Mekanisme *corporate governance* dianalisis dengan ukuran komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit. CSR dihitung menggunakan *corporate social responsibility disclosure index* (CSRI) yang didasarkan pada standar pelaporan *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan PROPER. Total sampel adalah 63 perusahaan yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yang mengeluarkan laporan tahunan selama periode 2008-2010. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa manajemen laba dan jumlah rapat komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Sementara itu, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Kata kunci: *corporate social responsibility disclosure index*, manajemen laba, mekanisme *corporate governance*.

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of earning management and corporate governance mechanism to corporate social responsibility disclosure. Corporate governance mechanism was analyzed by board of directors, proportion of independent boards of directors, managerial ownership, institutional ownership, audit committee, and number of audit committee meetings. The extent of CSR was measured used corporate social responsibility disclosure index (CSRI) based on Global Reporting

Initiative (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies annual report and sustainability report. The population in this research are all non-financial Indonesian firms listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) and PROPER. Total samples are 63 firms that selected using purposive sampling which were published annual report and financial report among 2008-2010. The method of analysis of this research used multi regression. The result of this research show that earning management and number of audit committee meetings had a positive significant effect to corporate social responsibility disclosure. Meanwhile, board of directors, proportion of independent boards of directors, managerial ownership, institutional ownership and audit committee had not significant effect to corporate social responsibility disclosure.

Keywords: corporate social responsibility disclosure index, earning management, corporate governance mechanism.

PENDAHULUAN

Perkembangan praktik dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sementara itu, di dalam pasal 74 dinyatakan bahwa kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No.25 tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial perusahaan (UU PT, 2007).

Utama (2007) menyatakan bahwa praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *good corporate governance* (GCG), yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan aturan

yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholders* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi.

Asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (prinsipal). Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan di antara pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Chih, Shen dan Kang (2008) serta Prior, Surroca dan Tribo (2008) merupakan peneliti pertama yang mengeksplorasi hubungan antara CSR dan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Prior et al. (2008) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dari praktik manajemen laba (*earnings management*) terhadap CSR. Prior et al. (2008) mengemukakan bahwa para manajer umumnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan korupsi melalui pelaksanaan dan pengungkapan CSR dengan menggunakan

kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan perilaku oportunistik. Berbeda dengan Prior et al. (2008), Chih et al. (2008) menemukan adanya hubungan negatif antara manajemen laba dengan CSR, ketika manajemen laba diproksikan dengan perataan laba (*income smoothing*). Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR lebih diharapkan untuk mengurangi kemungkinan perataan laba.

Penelitian mengenai hubungan *corporate governance (CG)* dan *corporate social responsibility (CSR)* juga telah banyak dilakukan di berbagai negara dan dalam kurun waktu yang berbeda. Said et al. (2009) menemukan bahwa faktor kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia. Namun Waryanto (2010) tidak menemukan adanya hubungan antara komite audit dengan luas pengungkapan CSR.

Menurut Tarjo (2008), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perseroan terbatas, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Herawaty (2008) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi dianggap perusahaan sebagai *sophisticated investor* karena mereka merupakan investor yang tidak mudah dibohongi oleh pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, investor institusional dapat memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan dan juga dapat menekan manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan secara maksimal.

Menurut Muntoro (2006) komposisi komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi *stakeholders* sehingga dapat mendorong pengungkapan informasi CSR yang lebih luas. Komisaris independen sangat diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-

benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya.

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Namun, karena kurangnya pengawasan pada sistem pengawasan perusahaan, manajer dapat dengan mudah melakukan tindakan manajemen laba dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual, untuk itu perlu adanya penerapan CG yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal (Widiatmaja, 2010).

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Handajani, Sutrisno, dan Chandarin (2009) yang meneliti pengaruh manajemen laba dan mekanisme CG terhadap CSR *disclosure*, di mana pada penelitian ini yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005-2007. Penelitian ini menggunakan manajemen laba dan mekanisme CG sebagai variabel independen di mana mekanisme CG diproksikan oleh proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran komite audit. Hasil penelitian Handajani, Sutrisno, dan Chandarin (2009) menyebutkan bahwa manajemen laba dan ukuran komite audit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSR.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handajani, Sutrisno, dan Chandarin (2009), yaitu penambahan variabel lain dalam mekanisme CG yang juga diduga mempunyai pengaruh terhadap CSR *disclosure* yaitu ukuran dewan komisaris, struktur kepemilikan manajerial, dan jumlah rapat komite audit.

Penambahan variabel lain tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Said et al. (2009) yang menemukan bahwa ukuran komite audit dan struktur kepemilikan saham manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Perusahaan dengan ukuran komite audit yang semakin besar akan semakin baik dan berkualitas dalam mengungkapkan informasi sosial perusahaan kepada masyarakat, sementara itu semakin besar kepemilikan saham manajerial di dalam perusahaan maka semakin produktif manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan. Penelitian ini dilatarbelakangi masih rendahnya kualitas dan kuantitas pengungkapan informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan lingkungan perusahaan di Indonesia. Terjadinya *fenomena gap* ini dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu secara optimal melaksanakan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga dimotivasi karena adanya *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah: 1) Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap CSR disclosure 2) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure 3) Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure 4) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure 5) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure 6) Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure 7) Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure.

Penelitian bertujuan menguji secara empiris bagaimana pengaruh manajemen laba, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap CSR disclosure. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu mengenai manajemen laba, mekanisme CG, dan CSR disclosure. Kontribusi praktis dalam membantu pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan digunakan dalam rangka memahami konsep GCG. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah hubungan kontrak antara investor (prinsipal) dengan manajer (agen). Wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Pada kenyataannya prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen yang memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).

Perbedaan informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba yang dapat menyesatkan pemilik perusahaan mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Menurut Richardson (1998), terdapat hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Hal ini berarti apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham maka kecenderungan manajer untuk berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadinya akan semakin tinggi.

Teori Legitimasi

Lingkungan masyarakat di mana perusahaan berada merupakan elemen penting dalam menjaga eksistensi dan keberlangsungan perusahaan. Kesadaran akan situasi tersebut semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kecerdasan masyarakat. Manajemen perusahaan butuh dukungan lingkungan masyarakat yang kondusif agar perusahaan dapat beroperasi dengan tenang. Dengan kata lain, perusahaan memerlukan legitimasi dari masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa & Cooke, 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994, dalam Haniffa et al, 2005).

Sehubungan dengan teori legitimasi, hal yang sangat menarik adalah hal yang mendasari teori legitimasi tersebut. Menurut Ghazali, Imam dan Chariri (2007) yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Selanjutnya, Shocker dan Sethi (1974, p.67) memberikan penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut:

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan, beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, di mana kelangsungan hidup dan pertumbuhan didasarkan pertama pada hasil akhir (*output*) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan, kedua distribusi

manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki.

Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup O'Donovan (2002). Adapun untuk mendapatkan legitimasi tersebut, perusahaan perlu menunjukkan tanggung jawabnya yang disebut sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) atau CSR. CSR menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat di mana perusahaan itu menjalankan kegiatannya. Oleh karena itu, pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat, dan tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk menunjang tujuan utama perusahaan yaitu mendapatkan profit maksimum. Lebih jauh lagi legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut.

Corporate Social Responsibility

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan.

Pengungkapan CSR bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan kepedulian dan dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya (Darwin, 2006).

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (*Global Reporting Initiatives*). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan *Indonesia Sustainability Report Awards* (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, *rigor*, dan pemanfaatan *sustainability reporting*. Dalam Standar GRI (GRI, 2006) indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk, dan masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup telah menerapkan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) sebagai alat untuk memeringkat kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sejak tahun 2002. Tujuan penerapan instrumen PROPER adalah untuk mendorong peningkatan kinerja

perusahaan dalam pengelolaan lingkungan melalui penyebaran informasi kinerja penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan guna mencapai peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kinerja penaatan dapat terjadi melalui efek insentif dan disinsentif reputasi yang timbul akibat pengumuman peringkat kinerja PROPER kepada publik. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada perusahaan yang belum berperingkat baik. Pelaksanaan PROPER saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2010 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kriteria yang digunakan untuk menunjukkan kinerja tersebut direpresentasikan dalam peringkat warna dari urutan terbaik sampai terburuk berturut-turut adalah warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam (Lampiran 2.)

Manajemen Laba

Menurut Assih dan Gudono (2000), manajemen laba merupakan proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan *General Accepted Accounting Principles (GAAP)* untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang memercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati & Na'im, 2000). Selain itu, karena adanya manajemen laba yang dilakukan manajemen, investor tidak menerima informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi *return* dan risiko portofolionya (Ashari et al., 1994).

Mekanisme Corporate Governance

Pengertian dan konsep CG dilandasi dengan Teori Keagenan (*agency theory*) di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan dengan penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Prinsip-prinsip GCG seperti yang disebutkan dalam Pedoman Umum GCG Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 meliputi: 1) Transparansi (*Transparency*); 2) Akuntabilitas (*Accountability*); 3) Responsibilitas (*Responsibility*); 4) Independensi (*Independency*); 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*).

Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility Disclosure

Imhoff dan Thomas (1994) menyatakan bahwa perusahaan dengan metode akuntansi yang lebih konservatif (dalam penelitian ini diprosikan dengan perusahaan yang terlibat untuk mengurangi manajemen laba) akan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada *stakeholders*. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan yang negatif antara manajemen laba dan pengungkapan informasi oleh perusahaan, di mana perusahaan yang mengurangi praktik manajemen laba akan mengungkapkan lebih banyak informasi mengenai aktivitas perusahaan dan perusahaan yang melakukan berbagai bentuk manajemen laba baik untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan perusahaan akan cenderung untuk melakukan pengurangan pengungkapan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lobo dan Zhou (2001) yang juga memperoleh hasil penelitian yang sama. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu penentu untuk mengetahui suatu perusahaan melakukan manajemen laba adalah dengan melihat kebijakan pengungkapan informasi (*disclosure policies*) perusahaan tersebut. Kebijakan yang

mengatur syarat minimum dalam melakukan pengungkapan informasi memegang peranan penting bagi kemampuan perusahaan untuk mengatur laba. Penelitian lain yang juga mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Fishman dan Hagerty (1990), Hutton dan Palepu (1990), Chih, *et al.* (2008), dan Handajani, Sutrisno, dan Chandarin (2009). Atas uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Mekanisme Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure

Ukuran Dewan Komisaris dan Corporate Social Responsibility Disclosure

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin *et al.* (2009), kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi akan lebih meningkat mengikuti pertambahan anggota dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang lebih besar dipandang sebagai mekanisme CG yang efektif untuk mendorong transparansi dan pengungkapan.

Sembiring (2005) dan Sulastini (2007) juga menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan CSR di Indonesia. Hal ini berarti bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka kegiatan pengawasan akan berjalan dengan baik dan pengungkapan CSR yang dibuat perusahaan semakin luas. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2a}: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Proporsi Dewan Komisaris Independen dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Haniffa dan Cooke (2002) menyatakan apabila jumlah komisaris independen di suatu perusahaan semakin besar atau dominan, maka dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasi perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholders* perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR lebih luas. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya (Muntoro, 2006). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2b}: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Kepemilikan Manajerial dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al., 2002). Penelitian Nasir dan Abdulah (2004) menunjukkan hasil signifikan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemilikan saham manajerial dengan luas pengungkapan CSR.

Konsisten dengan hasil tersebut Anggraini (2006) dan Rosmasita (2007) juga menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2c}: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Kepemilikan Institusional dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Summa dan Ali (2006), investor institusional memiliki *power* dan *experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka dapat menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Menurut Machmud dan Djakman (2008), perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar akan lebih mampu untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga perusahaan dapat bertindak sebagai pencegah terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Hal ini berarti dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, investor institusional akan dapat memonitor manajemen sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini konsisten dan senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2001) dan Murwaningsari (2009). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2d}: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Ukuran Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Ho dan Wang (2001) dan Handajani et al. (2009) keberadaan komite audit dapat memengaruhi pengungkapan yang dilakukan perusahaan secara signifikan. Komite audit membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian berjalan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan dengan semakin besarnya ukuran komite audit suatu perusahaan, pengawasan yang dilakukan pun semakin membaik dan kualitas informasi sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat dan semakin luas.

Collier (1993) dan Abdullah (2004) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dapat menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin besarnya komite audit, pengawasan yang dilakukan akan semakin maksimal dan pengungkapan informasi semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2e} : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Jumlah Rapat Komite Audit dan *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2009), diketahui bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Dengan demikian, semakin sering komite audit mengadakan pertemuan maka dapat

menambah keefektifan pengawasan manajemen, penerapan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan, dan dapat mendukung peningkatan pengungkapan CSR.

Fatayatiningrum (2011) menyatakan bahwa tingkat jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi. Hasil penelitian tersebut juga konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sun, et al. (2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H_{2f} : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2010. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang memiliki kriteria-kriteria berikut: a) Perusahaan non-keuangan yang telah terdaftar di BEI untuk periode 2008 dan 2010; b) Perusahaan yang mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2008 dan 2010; c) Perusahaan yang menyediakan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan lengkap untuk periode 2008 dan 2010; dan d) Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari situs resmi BEI dan situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan *archival research* yang berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *corporate social responsibility disclosure*, sedangkan variabel independen adalah manajemen laba dan mekanisme *corporate governance*.

Corporate Social Responsibility Disclosure

Pengungkapan CSR *disclosure* dinyatakan dalam *Corporate Social Responsibility Index* (CSRI). Pengukuran CSR *disclosure* dapat diperoleh melalui pengungkapan CSR dalam *annual report* maupun melalui laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang biasanya terpisah. CSRI dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah yang disyaratkan dalam GRI. Penilaian menggunakan indeks GRI (*Global Reporting Initiative*) telah dipakai oleh kurang lebih 1500 perusahaan di 60 negara (Nuraini, 2010). Indeks ini bersifat internasional yang memiliki format dan isi laporan lengkap dalam menyediakan informasi serta dapat digunakan untuk berbagai macam sektor dan ukuran perusahaan. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item). Secara rinci,

daftar indikator pengungkapan CSR menurut GRI dapat dilihat pada lampiran B.

Dalam penelitian ini, perhitungan CSRI dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CSRI} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{79}$$

Manajemen Laba

Manajemen laba dalam penelitian ini dideteksi menggunakan model yang dikembangkan oleh Kothari, *et al.* (2005) dengan menggunakan proksi *discretionary accrual*. Model tersebut merupakan pengembangan dari model *modified Jones* (1991) dengan menambahkan kinerja perusahaan – *return on assets* – sebagai variabel control dalam regresi total akrual (Sun, *et al.*, 2010). Langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*), yaitu:

$$\text{TACC} = \text{NI} - \text{CFO}$$

Dimana:

TACC = Total akrual perusahaan

NI = Laba bersih kas dari aktivitas operasi perusahaan

CFO = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan

- 2) Menentukan koefisien dari regresi total akrual.

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (*TACC*) dengan *nondiscretionary accrual* (*NDACC*). Langkah awal untuk menentukan *nondiscretionary accrual* yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} TACC/TA_{it-1} = & \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV - \\ & \Delta REC)/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE/ \\ & TA_{it-1}) + \beta_4(ROA_{it-1}/TA_{it-1}) \\ & + e \end{aligned}$$

Keterangan:

TACC = Total akrual perusahaan

TA_{it-1} = Total aset perusahaan pada akhir tahun t-1

ΔREV = Perubahan laba perusahaan

ΔREC = Perubahan piutang bersih (*net receivable*) perusahaan

PPE = *Property, plant and equipment* perusahaan

ROA_{it-1} = *Return on assets* perusahaan pada akhir tahun t-1

e = Error

3) Menentukan *nondiscretionary accrual*.

Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan koefisien β₁, β₂, β₃ dan β₄. Koefisien β₁, β₂, β₃ dan β₄ tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accrual* melalui persamaan berikut:

$$\begin{aligned} NDACC = & \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it-1} - \\ & \Delta REC_{it-1})/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it-1}/ \\ & TA_{it-1}) + \beta_4(ROA_{it-1}/TA_{it-1}) + e \end{aligned}$$

Dimana:

NDACC = *Nondiscretionary accrual* perusahaan

4) Menentukan *discretionary accrual*

Setelah didapatkan akrual non-diskresioner, kemudian *discretionary accrual* bisa dihitung

dengan mengurangi total akrual (hasil perhitungan di (1)) dengan *nondiscretionary accrual* (hasil perhitungan di (3)).

$$DACC = (TACC/TA_{it-1}) - NDACC$$

Dimana:

DACC = *Discretionary accrual* perusahaan

Mekanisme Corporate Governance

Ukuran Dewan Komisaris. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris dihitung dengan menggunakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang disebutkan di dalam laporan tahunan (Sembiring, 2005).

Proporsi Dewan Komisaris Independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris.

Kepemilikan Manajerial. Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial diukur dengan menghitung persentase (%) jumlah lembar saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu manajer, komisaris terafiliasi (diluar komisaris independen), dan direksi dibagi dengan total jumlah lembar saham yang beredar (Machmud & Djakman, 2008).

Kepemilikan Institusional. Kepemilikan saham institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusional. Investor institusional mencakup bank, dan pension, perusahaan asuransi, perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya. Kepemilikan saham institusional dinyatakan dalam persentase (%) yang diukur dengan cara membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional dengan jumlah total saham yang beredar (Machmud & Djakman, 2008).

Ukuran Komite Audit. Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Ukuran komite audit dihitung dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan yang tercantum dalam laporan tata kelola perusahaan.

Jumlah Rapat Komite Audit. Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat komite audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit.

Metode Analisis Data

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan melihat kurva histogram yang berbentuk lonceng. Pendeteksian normalitas secara statistik adalah dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05. Untuk lebih sederhana,

pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat probabilitas dari *Kolmogorov-Smirnov Z* statistik. Jika probabilitas *Z* statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi secara normal (Ghozali, 2007 dalam Ramadhan, 2010).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2010). Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Uji *white* yang pada prinsipnya meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Kriteria uji White adalah jika : $\text{Prob Obs}^* R \text{ square} < 0.05$, maka ada heteroskedastisitas; $\text{Prob Obs}^* R \text{ square} > 0.05$, maka tidak ada heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2010). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dilakukan dengan melihat berbagai informasi sebagai berikut:

- a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- b. Nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Di mana kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance*

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2010). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson* (DW). Nilai DW yang diperoleh dibandingkan dengan tabel-DW. Selanjutnya adalah keputusan untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah sebagai berikut: Jika hasil uji *Run Test* menunjukkan nilai probabilitas signifikan pada 0,05 maka terjadi autokorelasi; Jika hasil uji *Run Test* menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis (*hypothesis testing*). Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. Bentuk umum persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$CSRI = \alpha_0 + \alpha_1 DA + \alpha_2 UKOM + \alpha_3 INKOM + \alpha_4 MANJ +$$

$$\alpha_5 INST + \alpha_6 UDIT + \alpha_7 RADIT + e$$

di mana:

- CSRI : *Coporate social responsibility index*
- α_0 : Konstanta
- $\alpha_1 - \alpha_7$: Koefisien
- DA : Manajemen laba diproksikan dengan *discretionary accrual* (DA) UKOM : Ukuran dewan komisaris
- INKOM : Proporsi dewan komisaris independen
- MANJ : Persentase kepemilikan manajerial
- INST : Persentase kepemilikan institusional
- UDIT : Ukuran komite audit
- RADIT : Jumlah rapat komite audit

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Sampel

Sampel yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dengan periode 2008-2010. Perusahaan tersebut juga harus menerbitkan laporan tahunan per 31 Desember dan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk tahun 2008-2010. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) 2010 diketahui bahwa perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 hingga

2010 sebanyak 399 perusahaan. Dari jumlah tersebut, hanya 21 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Periode pengamatan penelitian ini adalah tahun

2008 sampai 2010 sehingga jumlah *annual report* dan *sustainability report* yang diteliti adalah 63 laporan. Proses pemilihan sampel tersebut ditunjukkan dalam Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI periode 2008 dan 2010.	399
Perusahaan yang tidak tergabung dalam PROPER selama tahun 2008 dan 2010.	(327)
Perusahaan tidak menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keberlanjutan tahun 2008 dan 2010.	(9)
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel-variabel penelitian.	0
Jumlah sampel	63

Sumber: Laporan tahunan perusahaan, laporan keberlanjutan perusahaan

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini berguna untuk mengetahui karakter sampel dalam penelitian. Data statistik deskriptif ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Statistik deskriptif untuk variabel-variabel penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 3.a.

Hasil analisis deskriptif yang tersaji pada Lampiran 3.a menunjukkan nilai rata-rata variabel CSR sebesar 0,4170 dengan standar deviasi 0,2765. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa CSRI yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama. Nilai minimum CSR adalah 0,0667 sedangkan nilai maksimumnya adalah 1,0.

Manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual* (DA) memiliki nilai minimum

sebesar -0,1916, nilai maksimum sebesar 0,2944. *Mean* DA sebesar -0,0221 dengan standar deviasi 0,0843. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata menunjukkan bahwa nilai DA perusahaan sampel memiliki perbedaan yang relatif besar. Hal ini disebabkan karena terdapat nilai DA yang bernilai negatif pada beberapa perusahaan sampel.

Ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 3,0, nilai maksimum sebesar 10,0. *Mean* ukuran dewan komisaris sebesar 5,8413 dengan standar deviasi 1,4051. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama.

Proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,2, nilai maksimum sebesar 0,80. *Mean* proporsi dewan komisaris independen

sebesar 0,4232 dengan standar deviasi 0,1116. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama.

Kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 0,754000. *Mean* persentase kepemilikan manajerial sebesar 0,0476 dengan standar deviasi 0,1579. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,10, nilai maksimum sebesar 1,0. *Mean* persentase kepemilikan institusional sebesar 0,6591 dengan standar deviasi 0,2408. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama.

Ukuran komite audit memiliki nilai minimum sebesar 3,0, nilai maksimum sebesar 5,0. *Mean* ukuran komite audit sebesar 3,4603 dengan standar deviasi 0,7583. Jumlah rapat komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2,0, nilai maksimum sebesar 51,0. *Mean* jumlah rapat komite audit sebesar 13,3809 dengan standar deviasi 10,7334. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan sampel memiliki besaran yang hampir sama.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera*. Uji ini membandingkan skewness (kemenjuluran) dan kurtosis (keruncingan) dari data dengan sebaran normal. Gambar dalam Lampiran 3.b menunjukkan grafik sebaran residual dari penelitian. Dalam penjelasannya didapatkan nilai *Jarque-Bera*

4,664823 dengan *probability* 0,097061. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai *probability* yang lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bisa dilakukan dengan melihat hubungan korelasi antar variabel independen yang ada dalam penelitian. Variabel independen dikatakan tidak memiliki hubungan linear apabila hubungan linear antar variabel lebih kecil dari 0,8. Semua nilai hubungan korelasi pada tabel dalam Lampiran 4.a tidak ada yang menunjukkan nilai yang lebih dari 0.8 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen dalam penelitian ini. Jadi, model regresi ini telah memenuhi uji multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji White. Hasil uji heteroskedastisitas dalam tabel pada Lampiran 4.b menunjukkan bahwa nilai *p-value* dari $obs.R^2$ sebesar 0,8734. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi, uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Hasil Uji Autokorelasi

Metode pengujian yang digunakan untuk uji autokorelasi ini adalah uji *Durbin-Watson*. Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson* dalam Lampiran 4.c diperoleh nilai DW hitung sebesar 1,849402. Sedangkan nilai *du* diperoleh sebesar 1,8457. Dengan demikian nilai DW hitung berada di antara *du*, yaitu 1,8457 dan *4-du*, yaitu 2,1543. Dengan demikian model regresi tersebut sudah bebas dari masalah autokorelasi.

Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik yang telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dipakai dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan layak untuk dilakukan analisis statistik selanjutnya. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode *least square*. Penelitian ini menggunakan *software Eviews* untuk melakukan analisis regresi berganda. Hasil regresi linear berganda dengan *software Eviews* dapat dilihat pada Lampiran 5., dan menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{CSRI} = & 0,283063 - 0,885975(\text{DA}) + \\ & 0,004863(\text{UKOM}) - 0,028336 \\ & (\text{INKOM}) - 0,161560(\text{MANJ}) - \\ & 0,203470(\text{INST}) - 0,008134(\text{UDIT}) + \\ & 0,007737(\text{RADIT}) + e \end{aligned}$$

Persamaan regresi di atas memiliki interpretasi bahwa besaran konstanta, yaitu α adalah 0,283063, ini berarti bahwa jika semua variabel independen memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel dependen adalah sebesar 0,283063. Besaran nilai DA, yang dilambangkan dengan α_1 adalah -0,885975, ini berarti bahwa setiap kenaikan DA sebesar satu satuan, maka akan menurunkan CSRI sebesar -0,885975. Besaran nilai Ukuran Dewan Komisaris (UKOM), yang dilambangkan dengan α_2 adalah 0,004863, ini berarti bahwa setiap kenaikan UKOM satu satuan maka CSRI akan naik sebesar 0,004863. Besaran nilai Proporsi Dewan Komisaris Independen (INKOM) yang dilambangkan dengan α_3 adalah -0,028336, ini berarti bahwa setiap kenaikan INKOM sebesar satu satuan, maka akan menurunkan CSRI sebesar -0,028336. Besaran nilai Kepemilikan Manajerial (MANJ) yang dilambangkan dengan α_4 adalah -

0,161560, ini berarti bahwa setiap kenaikan MANJ sebesar satu satuan, maka akan menurunkan CSRI sebesar -0,161560. Besaran nilai Kepemilikan Institusional (INST) yang dilambangkan dengan α_5 adalah -0,203470, ini berarti bahwa setiap kenaikan INST sebesar satu satuan, maka akan menurunkan CSRI sebesar -0,203470. Besaran nilai Ukuran Komite Audit (UDIT) yang dilambangkan dengan α_6 adalah -0,008134, ini berarti bahwa setiap kenaikan UDIT sebesar satu satuan, maka akan menurunkan CSRI sebesar -0,008134. Yang terakhir adalah besaran nilai Jumlah Rapat Komite Audit (RADIT) yang dilambangkan dengan α_7 adalah 0,007737, ini berarti bahwa setiap kenaikan RADIT sebesar satu satuan, maka akan menaikkan CSRI sebesar 0,007737.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Manajemen laba yang dalam penelitian ini menggunakan proksi DA memiliki pengaruh negatif terhadap CSR *disclosure*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -2,238956 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0294 (lihat Lampiran 5) yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Hal ini berarti hipotesis 1 diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lobo dan Zhou (2001), yang menemukan bahwa salah satu penentu untuk mengetahui adanya praktik manajemen laba di dalam perusahaan adalah dengan melihat kebijakan pengungkapan informasi (*disclosure policies*) perusahaan tersebut. Kebijakan yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi bisa mengurangi praktik manajemen laba yang ada dalam perusahaan. Menurut Chih et al. (2008) yang menemukan bahwa adanya pengaruh negatif antara manajemen laba dan CSR dikarenakan adanya pertimbangan yang berbeda dari manajemen dalam menyajikan informasi keuangannya.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Hasil uji t pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *CSR disclosure*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 0,189784 dengan nilai signifikansi sebesar 0,8502, sehingga nilai t hitung lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 2a ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Matoussi dan Chakroun (2008), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak memengaruhi luas pengungkapan sukarela, yang dalam hal ini pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Ketentuan di Indonesia dalam UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak dapat menjamin adanya mekanisme pengawasan yang lebih baik.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Hasil uji t pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *CSR disclosure*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,096121 dengan nilai signifikansi sebesar 0,9238 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 berarti hipotesis 2b ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Handajani et al. (2009) dan Said et al. (2009) yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara komisaris independen terhadap pengungkapan CSR. Penemuan ini menunjukkan

bahwa besar kecilnya ukuran dewan, keberadaan komisaris independen yang lebih banyak dalam jajaran komisaris independen tidak secara langsung memberikan lebih banyak item pengungkapan sosial yang harus diungkapkan. Keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen tidak dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan dengan aktivitas sehari-hari perusahaan (Che Ahmad et al., 2003 dalam Waryanto, 2010).

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Hasil uji t pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -0,710192 dengan nilai signifikansi sebesar 0,4807 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 berarti hipotesis 2c ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Huafang dan Jinguo (2007), Said et al. (2009), dan Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen tidak memengaruhi luas pengungkapan item CSR perusahaan. Hal ini mungkin terjadi karena kepemilikan manajerial rata-rata pada perusahaan di Indonesia masih relatif kecil. Dengan kepemilikan manajerial yang kecil, maka masih terdapat benturan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan, di mana manajemen tidak berusaha secara maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan yang sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan karena tidak adanya keuntungan signifikan yang akan diperoleh manajemen dengan melakukan hal tersebut.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Hasil uji t pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *CSR disclosure*. Hal ini

ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-1,342103$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,1853$ yang lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ berarti hipotesis $2d$ ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Machmud dan Djakman (2008) dan Utami dan Rachmawati (2008) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap CSR *disclosure*. Hal ini mungkin disebabkan karena institusi yang menanamkan modalnya pada perusahaan lain belum mempertimbangkan masalah tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail dalam laporan tahunan perusahaan.

Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Hasil uji t pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR *disclosure*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $-0,163221$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,8710$ yang lebih besar dari taraf signifikansi $0,05$ berarti hipotesis $2e$ ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhtaruddin, *et al.* (2009) dan Waryanto (2010) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran komite audit dengan tingkat pengungkapan sukarela. Pada umumnya, perusahaan di Indonesia mempunyai jumlah komite audit sebanyak 3 orang, hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan di Indonesia membentuk komite audit hanyalah sebagai formalitas untuk memenuhi peraturan saja, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kompleksitas perusahaan.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Hasil uji t pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap CSR *disclosure*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $2,207596$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,0316$ yang lebih kecil dari taraf signifikansi $0,05$ berarti hipotesis $2f$ diterima.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sun *et al.* (2010) dan Fatayatiningrum (2011) yang menemukan bahwa jumlah rapat komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *corporate environmental disclosure*, di mana CED merupakan salah satu proksi dari CSR. Alasan yang mendukung yaitu bahwa tingkat jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dapat menjamin bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen untuk melakukan kecurangan akan berjalan secara efektif. Dengan demikian, peluang manajemen untuk melakukan kecurangan dengan menyembunyikan informasi dapat diminimalisasi dan pengungkapan informasi lingkungan perusahaan menjadi semakin transparan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap CSR; 2) Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap CSR; 3) Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap CSR; 4) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR; 5) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR; 6) Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap CSR; 7) Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap CSR. Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bahwa indeks pengungkapan CSR yang

digunakan sebagai ukuran besarnya pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan sampel cenderung bersifat subjektif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbesar ukuran sampel dengan

memperpanjang tahun pengamatan dan menambah variabel lain yang diduga juga memengaruhi CSR seperti kompetensi komisaris, jumlah rapat komisaris, kepemilikan asing, kepemilikan publik, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhtarudin, M., Monirul, A.H., Mahmud H., & Lee Y. (2009). Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms. *JAMAR*, Vol.7, November.
- Anggraini, Fr, R. R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Study Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Ashari, N., & Koh H. C. (1994). Factor Affecting Income Smoothing Among Listed Companies in Singapore. *Journal of Accountin and Bussiness Reserch, Auntum*, pp. 291-304.
- Assih, P., & Gudono. (2000). Studi Empiris Tentang Hubungan Tindakan Perataan Laba Dengan Reaksi Pasar Atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Yang Terdaftar di BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (JRAI)*, Vol. 2, No. 1, hal 35-53.
- Belkaoui, A., & Karpik. (1989). Determinants of Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 2, No. 1, pp. 36-51.
- Chih, H., Shen, C., & Kang, F. (2008). Corporate Social Responsibility, Investor Protection, and Earnings Management: Some International Evidence. *Journal of Business Ethics*: 79:179–198.
- Darwin, A. (2006). Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR bagi Perusahaan di Indonesia. *Economics Business Accounting Review* (September-December): 83-95.
- Fatayatiningrum. (2011). *Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Corporate Enviromental Disclosure* [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Fishman, M., & Hagerty, K. (1990). The optimal amount of discretion to allow in disclosure. *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 105.
- Ghozali, & Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali. (2010). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan V. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handajani, L., Sutrisno, & Chandrarin, G. (2009). The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies in Indonesia Stock Exchange. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Palembang.
- Haniffa, R. M., & Cooke T. E. (2002). Culture, Corporate Governance and Disclosure in Malaysian Corporations. *Abacus*, Vol. 38 No. 3.

- Haniffa, R.M., & T.E. Cooke (2005), "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting", *Journal of Accounting and Public Policy* 24, pp. 391-430.
- Healy, P., Hutton, A., & Palepu, K. (1999). Stock Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure. *Contemporary Accounting Research*, 485-520.
- Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Pontianak.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, Vol 3: 305-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). *Pedoman Umum GCG di Indonesia*. Jakarta.
- Lobo, G. J., & Zhou, J. 2001. "Disclosure quality and earnings management." *Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics* V8 (1): 1-20.
- Machmud & Djakman. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan Tahunan Perusahaan: Study Empiris pada Perusahaan Publik yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 2006. *Simposium Nasional Akuntansi 11*.
- Muntoro, R. K. (2006). *Makalah: Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Universitas Indonesia.
- O'Donovan, 2002, "Environmental Disclosure in the Annual Report: Extending the Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory", *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol.15, No.3, pp.344-371.
- Prior, D., Surroca, J., & Tribo, J. A. (2008). Are socially responsible managers really ethical? Exploring the relationship between earnings management and corporate social responsibility. *Corporate Governance: An International Review* 16(3): 443-459.
- Putri, A. M. (2009). *Pengaruh Independensi dan Efektivitas Komite Audit terhadap Manajemen Laba*. [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Richardson, V. J. (1998). Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. *Working Paper*.
- Said, R., Zainuddin, Y., & Haron, H. (2009). The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristic in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, Vol. 5. No. 2: 212-226.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo.
- Setiawati, & Ainun Na'im. (2000). Manajemen Laba. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 15. No.4.
- Shocker, A.D & Sethi, S.P., 1974, "An Approach to Incorporating Social Preferences in Developing Corporate Action Strategies". In Sethi, S.P (ed) *The Unstable Ground: Corporate Social Policy in a Dynamic Society*, Los Angeles: Melville Publishing Company, pp.67-80
- Sulastini, S. (2007). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur yang Telah Go*

- Public* [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., & Habbash, M. (2010). Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance and Earnings Management, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 25: 7: 679 – 700.
- Tarjo. (2008). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost of Equity Capital. *Simposium Nasional Akuntansi 11*. Potianak.
- Utama, S. (2007). Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Pidato Ilmiah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*.
- Waryanto. (2010). *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia* [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Widiatmaja, B. F. (2010). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Dan Konsekuensi Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2006-2008)* [Skripsi]. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Wilmshurst, T., & Frost G. (2000). Corporate Environmental Performance: A Test of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 13, No. 1: 10-26.
- World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). (2000). *WBCSD's First Report Corporate Social Responsibility*. Geneva.
- <http://www.globalreporting.org>

LAMPIRAN

Lampiran 1. DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL

No	Nama Perusahaan	KODE
1	PT Bakrie Sumatra Plantation	UNSP
2	PT SMART	SMAR
3	PT Aneka Tambang (Persero)	ANTM
4	PT International Nickel Indonesia	INCO
5	PT Medco Energi Internasional	MEDC
6	PT Tambang Batubara Bukit Asam	PTBA
7	PT Timah (Persero)	TINS
8	PT Citra Tubindo	CTBN
9	PT Indocement Tunggul Prakarsa	INTP
10	PT Semen Gresik (Persero)	SMGR
11	PT Unggul Indah Cahaya	UNIC
12	PT. BudiAcidJaya	BUDI
13	PT Kalbe Farma	KLBF
14	PT Unilever Indonesia	UNVR
15	Astra Argo Lestari	AALI
16	PT Adaro Energy	ADRO
17	PT PP London Sumatra	LSIP
18	PT Elnusa	ELSA
19	PT Holcim Indonesia	SMCB
20	PT Bayan Resources	BYAN
21	PT Asahimas Flat Gas	AMFG

Lampiran 2. KRITERIA PERINGKAT PROPER

Peringkat Warna	Definisi
Emas	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle, Recovery</i>), menerapkan system pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat jangka panjang.
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai system pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle, Recovery</i>).

Peringkat Warna	Definisi
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
Biru Minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Merah	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Merah Minus	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hitam	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

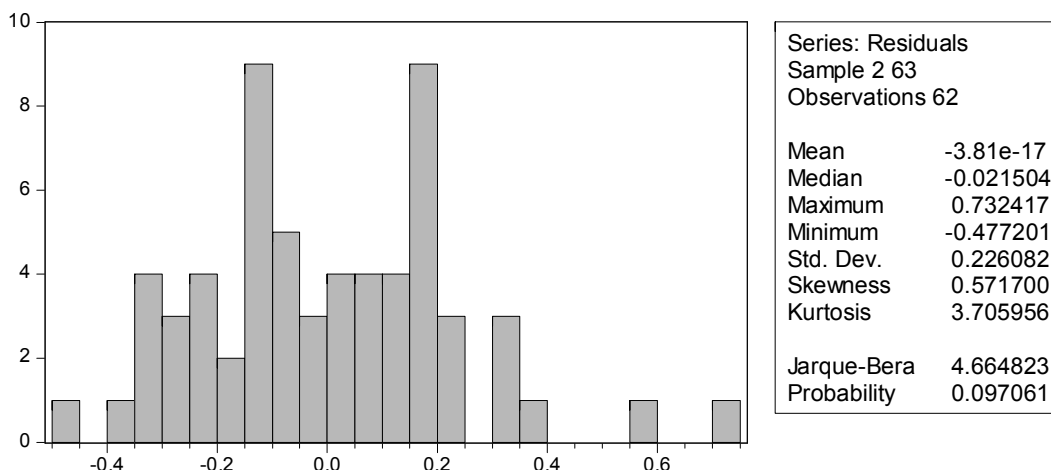
Sumber: Laporan PROPER periode 2008-2009

Lampiran 3a. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CSRI	63	0,0667	1,0000	0,4170	0,2765
DA	63	-0,1916	0,2944	-0,0221	0,0843
UKOM	63	3,0000	10,0000	5,8413	1,4051
INKOM	63	0,2000	0,8000	0,4232	0,1116
MANJ	63	0,0000	0,7540	0,0476	0,1579
INST	63	0,1000	1,0000	0,6591	0,2408
UDIT	63	3,0000	5,0000	3,4603	0,7583
RADIT	63	2,0000	51,0000	13,3809	10,7334
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah

Lampiran 3.b Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah

Lampiran 4a. Matriks Korelasi

	CSRI	DA	UKOM	INKOM	MANJ	INST	UDIT	RADIT
CSRI	1.0000	-0.1500	-0.0555	-0.0060	-0.0899	-0.2232	0.1467	0.3271
DA	-0.1500	1.0000	-0.1235	-0.0639	0.1769	0.0241	0.1275	0.1383
UKOM	-0.0555	-0.1235	1.0000	-0.2810	-0.1878	0.2773	-0.2785	-0.1082
INKOM	-0.0060	-0.0639	-0.2809	1.0000	-0.0635	-0.0894	0.0243	-0.1053
MANJ	-0.0899	0.1769	-0.1878	-0.0635	1.0000	-0.4095	0.0337	-0.0225
INST	-0.2232	0.0241	0.2773	-0.0894	-0.4095	1.0000	-0.1251	-0.1753
UDIT	0.1468	0.1275	-0.2785	0.0243	0.0337	-0.1251	1.0000	0.5270
RADIT	0.3271	0.1383	-0.1082	-0.1053	-0.0225	-0.1753	0.5270	1.0000

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah

Lampiran 4.b Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.434370	Prob. F(8,53)	0.8951
Obs*R-squared	3.814918	Prob. Chi-Square(8)	0.8734
Scaled explained SS	3.771762	Prob. Chi-Square(8)	0.8771

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah

Lampiran 4.c Durbin-Watson Test

Model	Durbin-Watson	du	4-du
1	1.849402	1.8457	2.1543

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah

Lampiran 5. Hasil Uji Regresi dengan Eviews

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 04/05/12 Time: 22:21

Sample (adjusted): 2 63

Included observations: 63

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CSRI	0.283063	0.325179	0.870481	0.3880
DA	-0.885975	0.395709	-2.238956	0.0294
UKOM	0.004863	0.025626	0.189784	0.8502
INKOM	-0.028336	0.294802	-0.096121	0.9238
MANJ	-0.161560	0.227488	-0.710192	0.4807
INST	-0.203470	0.151605	-1.342103	0.1853
UDIT	-0.008134	0.049836	-0.163221	0.8710
RADIT	0.007737	0.003504	2.207596	0.0316
R-squared	0.339162	Mean dependent var		0.419416
Adjusted R-squared	0.239413	S.D. dependent var		0.278111
S.E. of regression	0.242545	Akaike info criterion		0.138225
Sum squared resid	3.117900	Schwarz criterion		0.447003
Log likelihood	4.715024	Hannan-Quinn criter.		0.259459
F-statistic	3.400157	Durbin-Watson stat		1.849402
Prob(F-statistic)	0.003193			

Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah